

## BAB V

### SIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### 5.1 Simpulan

Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah dapat terlaksana dengan baik, sehingga kegiatan atau program yang dijalankan pemerintah dalam pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi yang ada di setiap daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya pada sektor pelayanan publik serta pembangunan infrastruktur yang ada. Hal ini mendorong proses desentralisasi agar berjalan dengan baik. Jika pendapatan asli daerah meningkat, akan meningkatkan kinerja keuangan daerah yang mana segala bentuk kegiatan di daerah akan terealisasi dengan baik. Peningkatan pendapatan asli daerah menunjukkan pemerintah daerah mengupayakan untuk menaikan target dari penerimaan pendapatan daerahnya sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Meningkatnya pendapatan asli daerah akan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana bantuan yang diberikan pemerintah pusat sehingga meningkatkan kemampuan daerah dalam mengelola sumber dan keuangan yang dimiliki.

Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan dana alokasi umum bukan berasal dari kreativitas pemerintah dalam merealisasikan pendapatan daerah seperti dalam meningkatkan pendapatan dengan memaksimalkan sumber-sumber daerah, sehingga dana alokasi umum ditentukan berdasarkan perbandingan antara bobot pemerintahan yang menjadi wewenang kabupaten/kota. Penggunaan dana alokasi

umum hanya digunakan untuk mendukung sektor-sektor produktif saja. Semakin tinggi belanja daerah akan mengakibatkan pemerintah tidak mampu membiayai sendiri dengan pendapatan asli daerah, maka pemerintah daerah mengambil salah satu bantuan yang bersumber dari dana perimbangan yaitu dana alokasi umum. Hal ini mempengaruhi kemampuan keuangan daerah dalam mendanai setiap kebutuhannya yang mengakibatkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana alokasi umum, namun tidak merubah kinerja yang dilakukan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerahnya.

Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan penerimaan dana alokasi khusus harus mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah pusat. Dana alokasi khusus digunakan untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan pemerintah daerah sebagai prioritas nasional, untuk membiayai seluruh kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat. Dana alokasi khusus yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah semakin besar, maka daerah tersebut belum mampu meningkatkan pembangunan dan pelayanan masyarakatnya karena pemerintah daerah masih mengandalkan dana bantuan dari pemerintah pusat sebagai pendapatan utamanya. Pemberian dana alokasi khusus memberikan pengaruh peningkatan terhadap pendapatan asli daerah yang digunakan untuk membiayai program kerja pemerintahan secara nasional. Sehingga dari hal tersebut mempengaruhi kemampuan keuangan daerah dalam mendanai dan membiayai setiap kebutuhannya yang mengakibatkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana alokasi umum namun tidak merubah kinerja yang dilakukan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerahnya.

## 5.2 Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat disampaikan sehubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur perlu untuk terus mengoptimalkan pendapatan asli daerah diantaranya yaitu dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan sarana dan prasarana, mengembangkan partisipasi masyarakat dalam wajib pajak serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat agar penerimaan pendapatan asli daerah dapat semakin meningkat. Perlu untuk mengelola keuangan daerah dengan meminimalisir ketergantungan terhadap pemerintah pusat berupa pendapatan transfer seperti dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.
2. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan cakupan sampel yang lebih luas, seperti Provinsi di Pulau Jawa yaitu: Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Jawa Timur. Menambah variabel independen untuk mengetahui lebih lanjut pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah, seperti: belanja modal, belanja daerah dan ukuran pemerintah daerah. Menambah rasio untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah, seperti: rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio kemandirian dan rasio aktifitas.